

Distorsi Moral Bangsa sebagai implikasi *money politic*

Nely Rohmatillah

Abstrak

Berbicara politik merupakan suatu hal yang tidak asing di semua kalangan. Baik di masyarakat paling bawah hingga teratas. Wacana politik dalam praktiknya dikenal dengan konotasi negatif, dimana berbicara politik seolah mengarah kepada kepentingan kedudukan, uang dan kekuasaan. Transaksi kekuasaan dalam politik bukan sesuatu yang seolah-olah tabu dalam masyarakat. Orang seolah sudah terbiasa memberikan uang dan menerima uang dalam pemilihan umum untuk memilih pemimpin maupun calon wakil rakyat. Moral masyarakat dan para calon dipertaruhkan dalam mendapatkan sesuatu yang dituju. Ketika jalan pintas menjadi pintu masuk memperoleh itu semua, maka secara tidak langsung mereka kehilangan moralitas hingga pada titik nol demi kekuasaan. Hasil analisa penulis menunjukkan bahwa penyebab itu semua. Pertama, karena sistem untuk memperoleh kekuasaan mengharuskan mengeluarkan modal untuk meraihnya. Kedua, adanya kepentingan sementara yang hanya mengarah kepada personal dan kelompok tertentu saja, sehingga menghilangkan pertimbangan moralitas yang ada. Ketiga aturan yang tidak jelas membuat keputusan tidak menjadi jelas dan tegas, sehingga memberikan peluang kepada kalangan yang berkepentingan untuk memanfaatkannya dalam pertarungan politik.

Kata kunci: Money politic, Moral bangsa, distorsi moral

A. PENDAHULUAN

Kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni polis yang berarti kota yang berstatus negara kota (city state) (Imam, 2009). Dalam negara kota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan (kebaikan, menurut Aristoteles) dalam hidupnya (Seta, 2011). Politik yang berkembang di Yunani kala itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama. Pemikiran mengenai politik pun khususnya di dunia barat banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani Kuno. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politics sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (polity) yang terbaik (Miriam, 2007). Namun demikian, definisi politik hasil pemikiran para filsuf tersebut belum mampu memberi tekanan terhadap upaya-upaya praksis dalam mencapai politik yang baik. Meskipun harus diakui, pemikiran politik yang berkembang dewasa ini juga tidak lepas dari pengaruh

para filsuf tersebut. Dalam perkembangannya, para ilmuwan politik menafsirkan politik secara berbeda-beda sehingga varian definisinya memperkaya pemikiran tentang politik. Melihat dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa politik dilakukan untuk mencapai kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Kesejahteraan itu sangat penting untuk dicapai dalam suatu negara atau masyarakat dalam rangka membuat situasi stabil dan aman. Akhir-akhir ini kata politik menjadi kata yang keluar dari makna asalnya dengan banyaknya kasus politik yang hanya mengarah kepada kepentingan kekuasaan, uang, dan kedudukan. Sehingga kata politik dalam masyarakat menjadi kata yang paling tidak bermoral, karena sebuah sistem yang kacau.

Politik merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk sampai pada suatu tujuan yang dikehendaki. Maka dari itu banyak para politisi secara individual dapat terus mengurus ruang privat dan publiknya melalui penggunaan sistem yang ada seperti pemilihan untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat, sehingga mereka tetap dapat mengurus masalah politik ketika ia tengah duduk di kursi kerjanya, yaitu melalui komunikasi yang bisa menjangkau masyarakat sasarnya melalui media. Politik seperti politik legislatif, politik birokrasi, politik yudisial, serta yang telah dibahas sekilas, politik partai. Dalam setiap domain tersebut, dapat diidentifikasi peran kunci, kepentingan yang bermacam-macam, aturan perilaku yang rutin, serta politik interaksi yang mapan, yang bila digabungkan dapat memperjelas bentuk khusus dari perjuangan politik. Terdapat 3 (tiga) pelaku dalam politik media, ialah politisi, jurnalis, dan orang-orang yang digerakkan oleh dorongan (kepentingan) khusus. Bagi politisi, tujuan dari politik media adalah dapat menggunakan komunitas massa untuk memobilisasi dukungan publik yang mereka perlukan untuk memenangkan pemilihan umum dan memainkan program mereka ketika duduk di ruangan kerja. Bagi jurnalis, tujuan politik media adalah untuk membuat tulisan yang menarik perhatian banyak orang dan menekankan apa yang disebutnya dengan “suara yang independen dan signifikan dari para jurnalis”. Bagi masyarakat, tujuannya adalah untuk

keperluan mengawasi politik dan menjaga politisi agar tetap akuntabel, dengan menggunakan basis usaha yang minimal. Tujuan tersebut merupakan sumber ketegangan konstan yang ada di ketiga aktor tadi. Politisi menghendaki para jurnalis untuk bertindak sebagai pembawa berita yang netral dalam statemen mereka dan dalam rilis pers.

Sementara para jurnalis tidak ingin menjadi tangan kanan pihak lain, mereka lebih berharap untuk bisa membuat kontribusi jurnalistik khusus untuk berita, dimana mereka dapat menyempurnakannya dengan menggunakan berita terkini, investigasi, dan analisis berita yang sangat dibenci oleh kalangan politisi. Masih dalam catatan saya tentang politik media, jurnalis menilai “suara jurnalistik”, paling tidak, sama besarnya dengan para pembaca dalam jumlah besar, dan para jurnalis ini sama sekali tidak ingin membantu politisi untuk menerbitkan berita mereka kepada publik. Jika jurnalis selalu saja melaporkan berita yang dikehendaki politisi, atau hanya melaporkan berita politik yang sesuai dengan keinginan pembaca, maka jurnalisme hanya akan menjadi profesi yang kurang menguntungkan dan kurang memuaskan bagi praktisinya, atau bahkan bukan lagi menjadi sebuah profesi. Pada dasarnya pihak publik menginginkan untuk mengawasi jalannya politik dan menjaga agar politisi tetap akuntabel dengan upaya yang minimal. Dan dikarenakan adanya kejenuhan pihak politisi dan para jurnalis yang bersaing untuk mendapatkan perhatian publik dalam pasar yang kompetitif, publik cenderung mendapatkan bentuk komunikasi politik yang mereka inginkan. Namun ini tidak berlaku seluruhnya. Kepentingan yang telah melekat pada diri politisi untuk mengontrol muatan berita politik, berpadu dengan kepentingan jurnalis untuk membuat kontribusi yang independen dalam berita, akan menciptakan ketegangan dan distorsi yang cukup besar.

Pendekatan untuk mempelajari politik akan berfokus pada kepentingan diri yang berbeda dari para partisipan dan bagaimana mereka membentuk sifat politik praktis dalam beberapa tahun ini hanya mengarah kepada kekuasaan dan mempertahankan kedudukan bukan untuk kesejahteraan. Ini merupakan titik

awal yang dari kebanyakan studi tentang politik media, yang cenderung melihat politik media melalui prisma teoritis yang berbeda. Satu riset media yang besar berfokus pada nilai dan konvensi jurnalis, seperti kesenangan mereka untuk meliput pers aingan politik (Patterson, 1993; Lichter, Rothman dan Lichter, 1986), ataupun kegiatan rutin dimana politik akan sangat berbahaya jika digunakan hanya untuk mempertahankan kekuasaan bukan kebenaran bernegara dan berbangsa. Politik adalah sebagai produk dari perilaku yang berorientasi pada tujuan (*goal-oriented behaviour*) dari aktor-aktor utama dalam sistem politik, yaitu politisi, jurnalis, dan masyarakat. Konflik politik dapat diamati perilaku berorientasi tujuan dari orang yang berinteraksi dengan mereka. Ada derajat kesulitan tertentu untuk memperkirakan tentang hal ini dalam memahami politik (atau bahkan perjuangan politik lainnya). Setiap orang dalam politik melakukan segala sesuatu yang diharapkan dan dilakukan oleh orang lain terhadap mereka secara signifikan. Sehingga, untuk membuat permisalan yang mudah, para kandidat menciptakan sebuah intisari kegiatan yang empiris dan teoritis, seperti yang dikemukakan oleh Schattschneider (1942), Schumpeter (1942), dan Black (1958) yaitu isu yang dilakukan dalam masyarakat dengan berdasar pada kepentingan mereka saja, bukan berorientasi kepada kepentingan bersama dalam berbangsa dan bernegara. Sifat ini yang kemudian hilang dari tubuh para politisi dan pemegang kebijakan untuk diaplikasikan dalam masyarakat.

B. PEMBAHASAN

Pembangunan suatu bangsa akan berjalan secara stabil dan maju. Apabila semua pihak dapat bahu membahu mulai dari menyumbangkan ide hingga ide itu menjadi suatu karya yang bisa dinikmati oleh semua pihak terendah hingga tertinggi. Namun kerikil tajam menghampiri suatu bangsa, karena pasti ada suatu pihak yang akan mengambil keuntungan untuk kepentingan masing-masing seperti uraian dibawah ini.

1. Politik Kepentingan Meniadakan Tegaknya Moral

Moral merupakan tiang kehidupan yang harus berdiri tegak untuk menciptakan peradaban yang berprinsip kemanusiaan. Ketika moral menjadi penyangga dalam berinteraksi dengan alam, maka kehidupan akan sesuai aturan. Tapi ketika moral hilang ditelan kepentingan kekuasaan, maka keadaan akan mengarah kepada kemerosotan dalam kehidupan keseharian. Dalam keseharian masyarakat sudah mengenal demokrasi, tapi politik kepentingan menghapus tegaknya demokrasi itu sebagai basis keadaan, yang ada hanya kepentingan. Semua yang dilakukan hanya berdasarkan kepada keuntungan kekuasaan atau posisi mereka sendiri tanpa melihat sisi kemanusiaan. Kredibilitas demokrasi bergantung, hingga suatu tingkatan tertentu, pada bagaimana lembaga lembaganya bekerja pada kenyataannya. Namun di beberapa negara demokrasi baru, warga hanya merasakan keuntungan minor ataupun hampir tidak ada keuntungan nyata dari pemerintah baru mereka tingkat kemiskinan tetap sama; layanan pemerintah tetap tidak efektif dan warga terus merasa terpisah dari pemerintah mereka.

Institut memainkan peran penting dalam menghubungkan warga dengan pemerintah. Ketika berfungsi secara efektif, rakyat atau warga dan pemerintah mengumpulkan kepentingan dan menempatkan kepentingan bersama atau bangsa pada konteks nasional. Melalui usaha dan kontrol dapat mempengaruhi kebijakan publik, dapat memainkan peran perantara, menghubungkan lembaga-lembaga pemerintah dengan kelompok masyarakat menyatu menjadi kekuatan untuk menggalang terbentuknya masyarakat ideal. Mereka menggalang dukungan di balik peraturan penting, menganjurkan posisi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kepentingan warga. Dalam hal yang sama, pemerintah melayani peran penting dalam pemerintahan yang demokratis dengan berkomunikasi bersama warga dan menanggapi kekhawatiran mereka, membentuk hukum dan kebijakan yang mencerminkan kepentingan nasional di atas kepentingan yang lain. Maka untuk menghapus kepentingan sementara itu perlu pendidikan moral sebagai basis kehidupan.

Pendidikan moral merupakan salah satu misi utama dalam proses pendidikan. Selagi ada wacana intelektual, para pemikir pendidikan seharusnya memberi perhatian dan mendiskusikan tentang perkembangan dan pembangunan peribadi insan terutamanya dalam aspek berkaitan pendidikan moral dan akhlak. Apalagi bila melihat semakin meningkatnya kasus-kasu money politik dalam tingkatan para pejabat negara. Justeru dalam melihat peranan dan sumbangan pendidikan moral dalam ini, kita perlu jelas tentang apakah asas keperluan dalam pendidikan moral yang dapat dianggap sesuai dan berpengaruh untuk diterapkan dalam diri setiap individu dalam konteks masyarakat kita yang mempunyai kepelbagai dalam sistem kepercayaan, adat, norma dan juga sistem nilai. Oleh karena itu akan mendiskusikan moral sebagai tiang kehidupan.

2. Sistem Politik Mengharuskan Budaya Korup

Ongkos politik begitu sangat mahal dalam meraih apa yang menjadi keinginan, seolah mengharuskan setiap politisi melakukan jalan belakang yang disebut dengan budaya korupsi kemudian menjadi jalan. Sistem politik dalam semestinya memudah para politisi untuk menegakkan panji-panji kesejahteraan ditengah masyarakat yang memerlukan. Tapi yang terjadi budaya korupsi dalam politik menjadi pertontonan setiap waktu dalam koran cetak maupun online. Ini seolah kegagalan sebuah sistem dalam menjalani kehidupan keseharian. Sistem politik menurut David Easton terdiri dari sejumlah lembaga-lembaga dan aktivitas-aktivitas politik dalam masyarakat yang berfungsi mengubah tuntutan-tuntutan (demands), dukungan-dukungan (supports) dan sumber-sumber (resources) menjadi keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang bersifat otoritatif (sah dan mengikat) bagi seluruh anggota masyarakat. Dari definisi tersebut, sistem politik mencerminkan sebagai suatu kumpulan aktivitas dari masyarakat politik (polity) untuk membuat suatu keputusan politik.

Almond mengatakan bahwa sistem politik menjalankan fungsi-fungsi penyatuan dan penyesuaian (baik ke dalam masyarakat itu sendiri

maupun kepada masyarakat lain) dengan jalan perbuatan atau ancaman untuk dilaksanakan walaupun agak bersifat paksaan (Sukarna, 1981). Hal ini mempertegas pernyataan Easton bahwa keputusan-keputusan politik yang dihasilkan dari kerangka kerja sistem politik sifatnya mengikat sehingga unsur paksaan dalam pelaksanaannya merupakan implikasi yang tidak dapat dihindari. Selanjutnya, Easton mengajukan suatu definisi sistem politik yang terdiri dari tiga unsur, diantaranya yaitu (1) sistem politik menetapkan nilai (dengan cara kebijaksanaan), (2) penetapannya bersifat paksaan atau dengan kewenangan, dan (3) penetapan yang bersifat paksaan itu tadi mengikuti masyarakat secara keseluruhan (Sukarna, 1981). Dari pendapat tersebut, maka sistem politik menunjukkan adanya unsur, (1) pola yang tetap antara hubungan manusia, yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik, (2) kebijakan yang mencakup pembagian atau pendistribusian barang-barang materiil dan immateril untuk menjadi kesejahteraan atau membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai negara secara mengikat, (3) penggunaan kekuasaan atau kewenangan untuk menjalankan paksaan fisik secara legal, dan (4) fungsi integrasi dan adaptasi terhadap masyarakat baik ke dalam maupun ke luar (Beddy, 2016). Sistem politik berkaitan erat dengan sistem pemerintahan dan sistem kekuasaan yang mengatur hubungan-hubungan individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan negara dan antara negara dengan negara (Sukarna, 1981).

3. Aturan Memberikan Jalan Money Politik

Aturan kelembagaan, negosiasi dan agenda kebijakan di pemerintahan sering dibangun dan dibentuk oleh kelompok dengan tujuan yang mengarah kepada keuntungan secara personal. Ketika sebuah aturan dibuat untuk keperluan sementara, maka dapat diprediksi bahwa hal itu akan memunculkan keadaan yang buruk pada masyarakat. Karena kepedulian untuk memulihkan kesadaran untuk belajar bersama lenyap dalam tiang kepentingan, yang ada hanya keuntungan, bukan persahabatan dalam bermasyarakat. Masyarakat diajarkan oleh keadaan untuk melakukan money

politik untuk mendapat apa yang menjadi keinginan mulai dari tingkatan yang sederhana hingga pada tingkatan yang kompleks. Masyarakat kemudian menjadi putus asa untuk belajar lebih untuk keperluan jangka panjang yang ada pada pemikiran mereka hanya bagaimana untuk bisa hidup saja. Karena keadaan tidak lagi berpihak kepada siapa yang benar, tapi kepada siapa yang berkuasa. Sehingga perlu pendidikan moral sebagai pengetahuan yang bisa dijadikan landasan dalam melakukan segala hal dalam kehidupan keseharian.

Deskripsi berkenaan pendidikan moral seharusnya bermula dengan memfokuskan kepada apakah sebenarnya yang dikatakan ‘insan bermoral’. Ini kerana apa pun pendekatan yang akan digunakan mestilah berdasarkan kepada pemahaman yang tepat dan jelas tentang insan bermoral itu sendiri. Menurut John Wilson (1973), komponen yang perlu ada dalam diri seorang insan bermoral dikategorikan sebagai konsep yaitu peraturan dan prinsip yang dipikirkan perlu digunakan dalam tindakan dan perasaan atau emosi yang akan mendukung kepercayaan bahawa sesuatu konsep atau tindakan itu perlu dilakukan. Selain itu seorang insan bermoral juga perlu mempunyai pengetahuan tentang keadaan lingkungan, tahu berinteraksi dengan orang sekelilingnya dan bertindak mengikuti pertimbangan yang telah dipikirkan atau keputusan yang telah dibuat. Lickona (1991) pula menyatakan untuk menjadi seorang yang bermoral, seseorang itu perlu mengetahui kebaikan, menginginkan kebaikan dan melakukan kebaikan dimanapun kita berada. Apalagi dalam partai politik yang memiliki ruang gerak dalam kekuasaan yang bisa diisi muatan moral, supaya keadaan menjadi bermartabat.

Teori Downs berfokus pada partai dan berasumsi bahwa tujuan politik mereka adalah mencapai dan mendapatkan ruang kerja dan ruang gerak politik yang lebih besar, dengan memformulasi kebijakan untuk mencapai tujuannya. Asumsi ini menekankan pada politisi individu daripada politisi sebagai tim partai politik. Dengan berdasar pada Downs, terlihat adanya persentuhan dengan proses dimana politisi mengkomunikasikan

usulan kebijakan mereka kepada pemilih, dengan menggunakan fungsi yang dimiliki oleh politik. Dalam praktik sesungguhnya politik dalam beberapa tahun ini mengarah kepada kepentingan kekuasaan saja dengan mengabaikan keadaan masyarakat, hal ini merupakan kegiatan yang dilakukan keluar dari tujuan awal politik yang memiliki kepentingan untuk kesejahteraan masyarakat secara komunal. Fenomena umum yang bisa dilihat saat ini, pemimpin politik banyak berkomunikasi dengan publik melalui media berita yang tidak bisa mereka kontrol. Media berita berdiri di antara politisi dengan konstituennya. Politisi berbicara dengan hanya mewakili kelompok dan tujuan sementara saja, tanpa memiliki keinginan yang kuat untuk memajukan masyarakat.

Moral atau etika perlu mempunyai kandungan yang terdiri daripada peraturan masyarakat dan sifat keperibadian mulia. Setiap kelompok masyarakat harus mempunyai peraturan untuk memperbolehkan manusia dapat hidup dan berfungsi dengan baik dengan lingkungan. Justru moralitas tidak boleh lari daripada peraturan, norma, tradisi atau adat kebiasaan dalam masyarakat. Oleh sebab itu sebagaimana yang dijelaskan oleh John Wilson (1973), peraturan masyarakat dan sifat keperibadian mulia perlu difahami oleh setiap individu kerana pemikiran moral tidak berkembang dalam keadaan vakum. Tanpa peraturan, kehidupan sosial manusia tidak dapat diteruskan kerana ia juga merupakan standar untuk menilai sesuatu aktiviti sosial (Wright, 1971). Disamping bertujuan untuk memelihara kemuliaan manusia, peraturan dalam menghemat tenaga dan waktu manusia daripada terpaksa berpikir bagaimana mereka sendiri harus melakukan. Namun begitu insan moral sebenarnya hanya menerima nilai-nilai murni dan peraturan masyarakat yang diterima secara sejagat sebagai bermoral, patut, baik dan benar. Oleh itu insan bermoral perlu peka dan memahami keperluan terhadap peraturan dalam masyarakat (Aroff, 1986). Insan bermoral juga perlu mempunyai ciri keperibadian mulia yang dapat dipuji dari segi moral. Keperibadian mulia adalah kecenderungan dan pembawaan

diri yang stabil untuk bertindak sesuai dengan situasi dengan moral, manifestasi dari sifat-sifat kebaikan, kejujuran, tanggungjawab, menghormati orang lain dan lain-lain (Lickona,1991a). Lebih penting ia mengandung cara insan bermoral patut mematuhi peraturan masyarakatnya dan bertindak sesuai aturan sesuai tuntunan dalam masyarakat.

C. KESIMPULAN

Masyarakat sudah mulai jenuh dengan pertikaian politik yang hanya berpihak kepada mereka yang memiliki kepentingan kekuasaan, tapi meniadakan moralitas dalam masyarakat. Padahal moralitas merupakan inti dari berdirinya kehidupan yang lebih hakiki. Mengingat kepekaan politik yang terlibat, informasi mengenai fungsi internal kelompok dalam pemerintahan berkotak sesuai dengan kelompok mereka, khususnya pertanyaan seputar proses pengambilan keputusan internal, kohesi dan disiplin sering terselubung dalam kerahasiaan. Institusi untuk Partai Politik dan Demokrasi dalam Perspektif Teoretis dan Praktis mulai menjelaskan cara kerja kelompok dalam pemerintahan tidak jauh dari pembagian kekuasaan dan kepentingan mereka. Hal itu mereka lakukan untuk mengamankan kedudukan dari serangan pihak lain yang sama-sama memiliki kepentingan yang sama.

Pendidik dan masyarakat umumnya harus menyadari bahwa pendidikan moral ialah suatu tanggungjawab yang tidak bisa dielak. Dalam menilai keperluan dan peranan pendidikan moral demi menangani tantangan politik uang, sehingga akhlak yang semakin membimbangkan, kita butuh membina satu domain pendidikan moral yang serasi dengan sistem nilai masyarakat pelbagai. Sehingga perlu difahami dengan jelas oleh setiap pendidik moral terutamanya untuk diaplikasikan sebagai keperluan dasar dalam pendidikan moral bagi mempunyai ke arah pembinaan insan yang menyeluruh, harmonis dari segi intelek, emosi, jasmani dan rohani. Dalam membuat persiapan menghadapi cabaran dan untuk masa depan yang tidak diketahui sifatnya, kita

wajar mempunyai satu konsep domain moral yang boleh digunakan untuk mengukur sesuatu pertimbangan nilai moral.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Md Aroff. 1986. Makna Moral. *Jurnal Kementerian Pendidikan Malaysia*.
- Abdul Rahman Md Aroff. 1999. *Pendidikan Moral: Teori Etika Dan Amalan Moral*. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.
- Basri Seta. 2011. *Pengantar Ilmu Politik*. Jogjakarta: Indie Book Corner.
- Budiardjo Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ewing, C.p. 1990. *When Children Kill. The Dynamics of Juvenile Homicide*. Lexington,MA Walker, L.J., Pitts, R.c., Hennig, K.H., & Matsuba, M.K. : Lexington Books.
- Hidajat Imam. 2009. *Teori-Teori politik*. Malang: Setara press.
- Lickona, T. 1991. *An Integrated Approach To Character Development*. Dalam J.S Benninga(ed). *Moral Character And Civic Education In The Elementary School*. New York : Teachers College Press.
- Lickona,T. 1991. *Educating For Character : How Our Schools Can Teach Respect And Responsibility*. New York: Bantam.
- Maksudi Iriawan Beddy. 2016. *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Samay, S.A. 1986. *Affectivity : The Power Base of Moral Behaviour*. Dalam G.F. Mc Lean, F.E. Ellrod, D.L. Shindler & J.A. Mann(eds.). *Act and Agent: Philosophical Foundations For Moral Education And Character Development*. New York : University Press of America.
- Sukarna. 1981. *Sistim Politik*. Bandung: Alumni.
- Wilson, John. 1973. *A Teacher's Guide To Moral Education*. London: Geoffrey Chapman.
- Wright, Derek. 1971. *The Psychology of Moral Behaviour*. Hazell Watson & Viney Ltd